

**MEKANISME PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN ATAS
PELANGGARAN DISIPLIN ASN BERDASARKAN
PP NO. 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN ASN
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(Studi Pada Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu)**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

SANTI MARLINA

NIM : 2423760006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026**

**MEKANISME PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN ATAS
PELANGGARAN DISIPLIN ASN BERDASARKAN PP NO. 94
TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN ASN
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(Studi Pada Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu)**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

SANTI MARLINA
NIM : 2423760006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN SEMINAR HASIL

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag

NIP. 196405311991031001

Dr. Ismail Jalili, MA

NIP. 197406182009011004

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Dr. Moch.Iqbal, M.Si

NIP. 19750526 200912 1 001

Nama : Santi Marlina

NIM : 2423760006

Tanggal Lahir : 10 Maret 1991



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul:

“MEKANISME PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN ATAS PELANGGARAN DISIPLIN ASN BERDASARKAN PP NO. 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN ASN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Pada Kanwil Ditjen Pemasarakatan Bengkulu)”

Penulis

Santi Marlina
NIM. 2423760006

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2026.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Nenan Julir, Lc., M.A (Ketua)	20-05-2026	1.
2	Dr. Fauzan, S.Ag., MH. (Sekretaris)	26-05-2026	2.
3	Prof. Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A (Anggota)	26-05-2026	3.
4	Dr. Miinudin, S.IP, M.Kes. (Anggota)	25-05-2026	4.

Mengetahui
Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Prof. Dr. H. Khairudin, M.Ag.
NIP. 19671114 199303 1 002

Bengkulu, Mei 2026
Direktur Pascasarjana UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu

Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Ag, M.Pd.
NIP. 19690308 199603 1 005

HALAMAN SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister (M.H) dari Program Pascasarjana (S2) UINFAS Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulisakn sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisna ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, April 2026



Santi Marlina
NPM.2423760006

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama : Dr. Ali Akbarjono, S.Ag., M.Pd

NIP. : 19750925 200112 1 004

Jabatan : Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah dilakukan Verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di Bawah ini :

Nama : Santi Marlina

NIM : 2423760006

Program Studi : Hukum Tata Negara

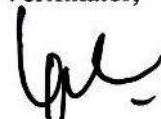
Judul Tesis : Mekanisme Penjatuan Hukuman Disiplin atas Pelanggaran Disiplin ASN Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin ASN Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi pada kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu).

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 17%. Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui Ketua Verifikator,


Dr. Ali Akbarjono, S.Ag., M.Pd
NIP. 19750925 200112 1 004

Bengkulu, 18 Mei 2026
Verifikator,


Dr. Moch. Iqbal, M.SI
NIP. 19750526 200912 1 001

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin atas Pelanggaran Disiplin ASN Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN Perspektif Fiqih Siyasah (Studi pada Kanwil Ditjen Pemasarakatan Bengkulu)”.. Shalawat dan salam penulis sampaikan pada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan di tengah dunia saat ini.

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terimakasih, terkhusus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Khairudin, M.Ag selaku rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan, dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.

2. Bapak Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Ag, M.Pd selaku Direktur Program Pasacasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah banyak memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Moch. Iqbal, M.Si selaku Ketua Program Studi HTN Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag selaku pembimbing I yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Ibu Dr. Ismail Jalili, MA selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta menjadi sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkah kehidupan penulis. Tiada kata yang mampu membalas segala cinta dan perjuangan yang telah diberikan, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian .
7. Suami dan anak-anakku , yang selalu memberikan semangat, motivasi, perhatian, dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
8. Bapak Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasarakatan Bengkulu dan seluruh Jajaran yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Kantor Wilayah Ditjen Pemasarakatan

Bengkulu.

9. Segenap civitas Akademi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak
yang telah membantu penulis diterima Allah Swt dan dicatat sebagai amal
baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis
khususnya maupun para pembaca umumnya. Amin

Bengkulu, Mei 2026
Penulis,

Santi Marlina
NIM 2423760006



ABSTRAK

Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin atas Pelanggaran Disiplin ASN Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta meninjau implementasinya dalam perspektif fiqh siyasah di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya pelanggaran disiplin ASN di lingkungan birokrasi, khususnya pada institusi pemasyarakatan yang menuntut integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab tinggi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan efektivitas hukum dan bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara yuridis empiris menggunakan metode deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penjatuhan hukuman disiplin di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2021 melalui tahapan pemeriksaan, pemanggilan, klarifikasi, penjatuhan sanksi, dan pembinaan lanjutan. Implementasi kebijakan didukung oleh kepemimpinan yang tegas, sistem pengawasan berbasis teknologi, serta kompetensi tim pemeriksa. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti rendahnya kesadaran disiplin sebagian ASN dan adanya faktor budaya organisasi yang mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin. Dalam perspektif fiqh siyasah, penjatuhan hukuman disiplin ASN sejalan dengan konsep ta'zir yang bertujuan menciptakan kemaslahatan, menjaga amanah jabatan, menegakkan keadilan, serta memberikan efek edukatif dan preventif kepada pelanggar. Penegakan disiplin tidak hanya dipandang sebagai bentuk penghukuman administratif, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan tanggung jawab aparatur negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Disiplin ASN, Hukuman Disiplin, PP Nomor 94 Tahun 2021, ASN Fiqh Siyasah, Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Mechanism for Imposing Disciplinary Sanctions on Civil Servants for Disciplinary Violations Based on Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline from the Perspective of Fiqh Siyasah (A Study at the Regional Office of the Directorate General of Corrections, Bengkulu)

This study aims to analyze the mechanism for imposing disciplinary sanctions on Civil Servants (ASN) based on Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline and to examine its implementation from the perspective of fiqh siyasah at the Regional Office of the Directorate General of Corrections in Bengkulu. This research is motivated by the persistent occurrence of disciplinary violations among civil servants within the bureaucracy, particularly in correctional institutions that require high standards of integrity, professionalism, and accountability in carrying out governmental duties. This study employed a sociological legal research method with a legal effectiveness approach and a descriptive qualitative design. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using an empirical juridical approach through both deductive and inductive methods. The findings indicate that the mechanism for imposing disciplinary sanctions at the Regional Office of the Directorate General of Corrections in Bengkulu has been implemented in accordance with Government Regulation Number 94 of 2021 through the stages of investigation, summons, clarification, imposition of sanctions, and follow-up guidance. The implementation of the policy is supported by firm leadership, a technology-based supervision system, and the competence of the disciplinary examination team. However, several challenges remain, including the low level of disciplinary awareness among some civil servants and organizational cultural factors that affect the effectiveness of disciplinary enforcement. From the perspective of fiqh siyasah, the imposition of disciplinary sanctions is consistent with the concept of ta'zir, which aims to promote public welfare (maslahah), uphold the trust attached to public office, ensure justice, and provide educational as well as preventive effects for offenders. Therefore, disciplinary enforcement is viewed not merely as a form of administrative punishment but also as a means of fostering moral development and strengthening the accountability of state officials in realizing good governance.

Keywords: Civil Servant Discipline, Disciplinary Sanctions, Government Regulation Number 94 of 2021, Fiqh Siyasah, Corrections.

Valid document
Validated & Verified By :

Ka. UPT BAHASA
UINFAS BENGKULU

ملخص

آلية توقيع العقوبات التأديبية على مخالفات الانضباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية الحكومية وفقًا لللائحة الحكومية رقم (94) لسنة 2021 بشأن انضباط موظفي الخدمة المدنية من منظور الفقه السياسي الشرعي (دراسة في المكتب الإقليمي للمديرية العامة للإصلاحات بمدينة بنغكولو)

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل آلية توقيع العقوبات التأديبية على موظفي الخدمة المدنية الحكومية (ASN) وفقًا لأحكام اللائحة الحكومية رقم (94) لسنة 2021 بشأن انضباط موظفي الخدمة المدنية، ودراسة تطبيقها من منظور الفقه السياسي الشرعي في المكتب الإقليمي للمديرية العامة للإصلاحات بمدينة بنغكولو. وقد جاءت هذه الدراسة انطلاقًا من استمرار وقوع المخالفات التأديبية بين موظفي الخدمة المدنية في الجهاز البيروقراطي، ولا سيما في مؤسسات الإصلاحات التي تتطلب مستوى عاليًا من النزاهة والمهنية والمسؤولية في أداء المهام الحكومية. اعتمدت الدراسة المنهج القانوني السوسيولوجي، من خلال مدخل فاعلية القانون، وبأسلوب الوصفي النوعي. وجمعت البيانات عن طريق المقابلات، والملاحظة، والوثائق، ثم حُلَّت تحليلًا قانونيًا تجريبيًا باستخدام المنهج الاستنباطي والاستقرائي. وأظهرت نتائج الدراسة أن آلية توقيع العقوبات التأديبية في المكتب الإقليمي للمديرية العامة للإصلاحات بمدينة بنغكولو قد نُفِذَتْ وفقًا لأحكام اللائحة الحكومية رقم (94) لسنة 2021، وذلك من خلال مراحل الفحص، والاستدعاء، والتوضيح، وتوقيع العقوبة، والمتابعة بالتوجيه والتأهيل. كما دعمت عملية تنفيذ السياسة قيادة حازمة، ونظام رقابي قائم على التكنولوجيا، وكفاءة فريق التحقيق التأديبي. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المعوقات، من أبرزها انخفاض مستوى الوعي بالانضباط لدى بعض موظفي الخدمة المدنية، إضافة إلى تأثير الثقافة التنظيمية في فاعلية تطبيق الانضباط. ومن منظور الفقه السياسي الشرعي، فإن توقيع العقوبات التأديبية على موظفي الخدمة المدنية يتوافق مع مفهوم التعزيز الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وصيانة الأمانة الوظيفية، وإقامة العدل، وإحداث أثر تربوي ووقائي للمخالفين. ومن ثم فإن تطبيق الانضباط لا يُعد مجرد عقوبة إدارية، بل يُمثل أيضًا وسيلةً للتقويم الأخلاقي وتعزيز المسؤولية لدى موظفي الدولة من أجل تحقيق الحوكمة الرشيدة.

الكلمات المفتاحية: انضباط موظفي الخدمة المدنية الحكومية، العقوبات التأديبية، اللائحة الحكومية رقم (94) لسنة 2021، الفقه السياسي الشرعي، الإصلاحات.

Valid document
Validated & Verified By :



Ka. UPT BAHASA
UINFAS BENGKULU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	x
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Penelitian Terdahulu.....	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Implementasi Kebijakan	28

B. Tinjauan Umum Disiplin Aparatur Sipil Negara	
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara	33
2. Jenis, Fungsi dan Tugas Aparatur Sipil Negara	37
3. Pengaturan Disiplin Aparatur Sipil Negara.....	39
C. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN	
1. Latar Belakang PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN	43
2. Kewajiban Aparatur Sipil Negara	47
3. Tata Cara Pemeriksaan dan Penjatuhan Disiplin	50
D. <i>Fiqh Siyasah</i>	
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	57
2. Landasan Normatif <i>Fiqh Siyasah</i>	61
3. Ruang Lingkup dan Pembagian <i>Fiqh Siyasah</i>	64
4. Prinsip-Prinsip Fundamental <i>Fiqh Siyasah</i>	67
E. Teori Diskresi.....	71
F. Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>) dalam Analisis Disiplin ASN.....	74

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah.....	77
B. Identitas Logo	79
C. Visi dan Misi	80

D. Tugas dan Fungsi	81
E. Struktur Organisasi.....	82
F. Letak Geografis.....	82

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap ASN yang Melakukan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021	
1. Pendalaman Terhadap Pelaporan dan Deteksi Awal dengan Pelanggaran Displin	84
2. Pemanggilan Secara Tertulis dan Pemeriksaan Oleh Atasan Langsung.....	85
3. Pengklasifikasian Penggolongan dan Penetapan Jenis Hukuman Disiplin.....	88
4. Pengeluaran Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Displin .	97
5. Respon Terhadap Pengajuan Keberatan dan Pelanggaran Disiplin.....	99
6. Eksekusi dan Monitoring Hasil Keputusan Penjatuhan Hukuman Displin	100
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bengkulu	
1. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab.....	121
2. Penerapan Prinsip <i>Al-'Adalah</i> (Keadilan) dalam Proses	

Pemeriksaan	125
3. Prinsip Ta'zir sebagai Kerangka Analisis Sanksi	
Administratif	129
4. Prinsip Ketaatan kepada Ulil Amri dan Legalitas PP No. 94	
Tahun 2021	132
5. Pandangan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM)	
Provinsi Bengkulu terhadap Mekanisme Penjatuhan Hukuman	
Disiplin ASN.....	134
6. Sub-Kesimpulan Tinjauan Fiqh Siyasah	137
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	141
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	

